



Media: Harian Jogja

Hari: Sabtu

Tanggal: 26 April 2025

Halaman: 3

► PENATAAN LEMPUYANGAN

Warga Kukuh Menolak Taksiran Kerugian

UMBULHARJO-Warga Kelurahan Bausasran, Kemantren Danurejan, kukuh menolak rencana relokasi dan penataan kawasan Stasiun Lempuyangan. Warga mengaku PT KAI telah menyampaikan taksiran nilai ganti kerugian bangunan yang bakal terdampak.

Stefani Yulindriani
stefani@harianjogja.com

Ketua RW 01, Kelurahan Bausasran, Anton Handriutomo, mengatakan perwakilan PT KAI mendatangi rumahnya pada Kamis (24/4). Mereka menyampaikan taksiran ganti kerugian untuk bangunan yang berdiri di tanah Sultan Grond (SG) yang disengketakan dengan PT KAI.

"PT KAI akan memberikan kompensasi untuk bangunan di luar bangunan induk. Untuk bangunan tambahan permanen Rp250.000 per meter, dan bangunan semi permanen Rp200.000 per meter," ujarnya saat ditemui setelah audiensi di Kantor DPRD

► Untuk bangunan tambahan permanen Rp250.000 per meter, dan bangunan semi permanen Rp200.000 per meter.

► Warga berharap Dewan dapat mengambil sikap terhadap warga terdampak.

Kota Jogja, Kamis (24/4).

Anton menyatakan perwakilan PT KAI siap menyediakan truk untuk memindahkan barang-barang milik warga. "Ketika saya tanya pindah ke mana, mereka enggak bisa jawab. Katanya silakan datang pada sosialisasi ketiga," katanya.

PT KAI rencananya menggelar sosialisasi ketiga pada Rabu (30/4). Sementara, surat undangan akan disampaikan kepada warga pada Senin (28/4).

Dia mengaku warga terdampak tetap menolak rencana relokasi. Warga menunggu audiensi bersama dengan GKR Mangkubumi selaku Penghageng Tepas Panitikismo Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Meski begitu, Anton akan bermusyawarah

dengan warga terdampak terkait dengan sikap yang akan disampaikan dalam sosialisasi.

"Mayoritas warga tetap menolak sosialisasi, tapi saya akan berbicara dengan warga dulu bagaimana mengambil keputusannya," katanya.

Selagi menunggu sosialisasi, Anton bersama warga terdampak akan mengadakan permasalahan tersebut kepada DPRD DIY. Dia berharap anggota Dewan dapat mengambil sikap yang memihak warga terdampak. Warga juga berencana mengurus *serat palilah* untuk bangunan yang ditempati. "Kami punya Surat Keterangan Tanah [SKT], sama seperti PT KAI yang menindaklanjuti *palilah ke kekancingan*," katanya.

Ketua DPRD Kota Jogja, FX. Wisnu Sabdono Putro, mengatakan Komisi A akan menindaklanjuti aduan warga terdampak tersebut. Dia meminta PT KAI agar tidak berlaku arogan. "PT KAI jangan *menang-menangan dewe*. Kalau PT KAI akan menata kawasan Lempuyangan, ya harus ada musyawarah," ujarnya.

Menurut Wisnu, warga terdampak

merasa terintimidasi dengan sikap PT KAI yang memberikan undangan sosialisasi rencana relokasi tersebut sehari sebelum acara. Selain itu, keberadaan Polisi Khusus Kereta Api (Polsuska) yang mengantarkan surat dinilai mengintimidasi warga. "Prinsipnya yang terbaik dari masyarakat terdampak," katanya.

Anggota Komisi A DPRD Kota Jogja, Indaruwanto Eko Cahyono, mengatakan pada Senin (28/4) jajarannya akan menggelar rapat untuk menentukan langkah. Jajarannya akan menggandeng Disperparu Kota Jogja untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. "Apapun hasilnya, harus dicari jalan tengahnya, jangan sampai ada pihak yang dirugikan, terutama masyarakat," katanya.

Sementara Manager Humas KAI Daop 6, Feni Novida Saragih, tidak banyak berkomentar. Dia mengaku perkiraan nilai ganti rugi atas relokasi tersebut akan ditentukan setelah dilakukan pengukuran tanah. "Sejauh ini belum ada perhitungan karena pengukuran belum terlaksana, warga meminta ada mediasi sebelum dilakukan pengukuran," katanya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005